

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, 1985:13).

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Badan Pusat Statistik (2012) tentang pertumbuhan ekonomi atau *Gross Domestic Product* (GDP) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 mencapai 6,1%. Pada tahun 2009, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yakni sebesar 4,5%. Tapi, setelah perekonomian dunia mulai membaik pada tahun 2010 mengalami perkembangan kembali mencapai 6,3%. Sedangkan pada tahun 2011, mengalami peningkatan lagi dengan angka 6,5% yang merupakan angka tertinggi pada satu dekade terakhir. Tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23% pada tahun 2012.

Salah satu penentu pertumbuhan ekonomi menurut Jhingan (Novita Juni) adalah pembentukan modal (*capital formation*) dan investasi. Perubahan dalam investasi akan mempengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya juga pada output dan kesempatan kerja. Menurut Samuelson (Novita Juni), jika suatu nilai investasi di suatu negara tersebut meningkat maka output potensial suatu bangsa bertambah dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Tata kelola ekonomi daerah (*local economic governace*) merupakan salah satu aspek penting bagi penciptaan iklim investasi daerah. Hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan (KPPOD, 2012).

Tata kelola ekonomi daerah terbentuk dari desentralisasi daerah. Proses desentralisasi selama sepuluh tahun terakhir menciptakan berbagai tantangan bagi Indonesia. Desentralisasi memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintahan daerah, terutama kabupaten/kota, termasuk yang terkait dengan iklim investasi. Kewenangan untuk menyederhanakan prosedur perizinan, menghapus peraturan dan pungutan yang mengganggu atau memberatkan dunia usaha, mendorong pengembangan usaha kecil, dan menyediakan infrastruktur yang baik sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah daerah. Berbagai aspek tata kelola (*governance*) ekonomi ini perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia (KPPOD, 2010).

Menurut Rosyidi 1991 : 10 (penelitian Muchammad Rizal Rachman), dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kebutuhan akan penanaman modal atau investasi, karena investasi adalah kebutuhan utama dalam pembangunan yang menghendaki adanya tingkat pertumbuhan. Investasi

atau penanaman modal adalah motor suatu perekonomian yaitu banyaknya investasi yang direalisasikan di dalam suatu negara yang bersangkutan, sedangkan sedikitnya investasi akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan ekonomi.

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2012, yang diproyeksikan tumbuh 6,3%, sekitar 60% ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (KRT) dan sekitar 20% oleh investasi langsung. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan IV-2012 mencapai Rp26,5 triliun. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 10,4% (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi PMDN pada triwulan IV-2011 sebesar Rp24 triliun. Sedangkan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV-2012 mencapai Rp56,8 triliun, atau tercatat meningkat 22,9% (yoy) jika dibandingkan triwulan IV-2011 sebesar Rp46,2 triliun. Kenaikan nilai realisasi investasi langsung merupakan dampak dari upaya perbaikan iklim investasi yang telah dilakukan jajaran BKPM, baik di pusat maupun di daerah. Contohnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). BKPM akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera menambah PTSP.

BKPM juga mencatat, secara kumulatif realisasi investasi Januari-Desember 2012 yaitu sebesar Rp313 triliun, di mana realisasi PMDN sebesar Rp92 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp221 triliun. Sebaran lokasi proyek pada triwulan IV 2012 di luar Jawa sebesar Rp30,6 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011, terjadi peningkatan sebesar 38,5% dari Rp22 triliun, dan realisasi investasi di Jawa adalah sebesar Rp52 triliun.

Pada triwulan IV-2012 lalu realisasi investasi di luar Jawa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini disebabkan karena BKPM terus

mendorong pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem regulasi, dan mendesak pemerintah daerah dalam menerapkan Online Tracking System karena sistem ini bertujuan untuk mempermudah izin usaha atau investasi.

Peran pemerintah dalam investasi tersebut sangat diperlukan. Peraturan tata kelola pemerintah dalam memperlancar investasi misalnya adalah mempermudah izin usaha atau investasi seperti yang di paparkan di atas. Disini jelas ada keterkaitan antara tata kelola pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meski investasi di Indonesia dikatakan terus meningkat, namun hanya beberapa kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi melesat, memiliki investasi yang kuat dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakatnya. Di sisi lain, banyak kabupaten yang secara pertumbuhan ekonomi tertinggal jauh di belakang.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten ditengarai sebagai penyebab dari perbedaan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam kualitas iklim investasi lokal yang dimiliki oleh setiap kabupaten di Indonesia. hal tersebut bisa terlihat di Indonesia banyak daerah-daerah yang tertinggal, yang pertumbuhan ekonominya rendah. Sedangkan di daerah lain terdapat pertumbuhan ekonomi yang melesat tinggi (McCulloch, 2010).

Hal tersebut mengacu pada tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintah merupakan seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata kelola pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.

Menurut King dan McLeod (penelitian SMERU), tata kelola pemerintah menjadi sesuatu yang penting, ada hipotesis bahwa tata kelola pemerintahan yang buruk secara populer disebut KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) telah melemahkan kondisi ekonomi di Indonesia dan membuat Indonesia menjadi mudah terserang krisis ekonomi secara periodik. KKN menjadi ciri khas pemerintahan orde baru, yang terkenal sangat mentolelir praktek KKN baik yang dilakukan secara kecil – kecilan oleh pejabat tingkat bawah sebagai suatu cara untuk mencari tambahan penghasilan, maupun yang berskala raksasa yang dilakukan oleh keluarga penguasa (penguasa pada pemerintahan orde baru) dan kroni mereka melalui pengaturan kebijakan pemerintah yang menguntungkan bisnis mereka. Hal ini sering dilakukan melalui praktek kolusi dalam bisnis baik dengan domestik maupun asing dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Pada akhir masa orde baru, KKN memuncak melalui praktek nepotisme yang dilakukan oleh keluarga pengusaha melalui pengangkatan anggota keluarga dan teman dekat ke dalam posisi eksekutif dan legislatif.

Menurut Hamilton Hart dan Sherlock (penelitian SMERU), tata kelola pemerintahan yang buruk dalam masa orde baru dan pemerintahan penggantinya telah membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara paling korup di dunia untuk beberapa lama. Meskipun demikian, karena sebelum krisis Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, problem ini diabaikan oleh pembuat kebijakan. Untuk banyak orang, pertumbuhan ekonomi ini sudah cukup sebagai kompensasi kerugian dan inefisiensi yang timbul dari tata kelola pemerintahan yang buruk tersebut. Timbulnya krisis ekonomi menunjukkan seriusnya masalah KKN ini. MPR bahkan telah mengeluarkan ketetapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik

di Indonesia. namun, upaya mencapainya terbukti sangat sulit dan sepertinya mustahil.

Tata kelola pemerintahan melalui tugas negara yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Khususnya pemerintah, secara umum adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh salah satunya melalui investasi Oleh sebab itu penulis ingin meneliti tentang “PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu adakah Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dalam menangani permasalahan tata kelola pemerintah yang kurang baik.
2. Sebagai bahan masukan rekomendasi agar dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat maupun peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pengembangan keilmuan tentang pengaruh tata kelola pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya penelitian, serta dapat dipergunakan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya, baik dalam model, cara analisis maupun hasilnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Kerangka sistem penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain, disesuaikan dengan materi pembahasan yang diteliti. Secara umum pembahasan tiap bab (terdiri dari beberapa sub bab) dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membuat uraian tentang landasan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan maupun literatur-literatur yang dijadikan pedoman dan pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga dicantumkan mengenai penelitian sebelumnya serta model analisis yang digunakan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membuat uraian tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum subyek penelitian, hasil penelitian yang di sertai pula dengan hasil akhir pengolahan, analisa dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan mengenai simpulan-simpulan dan uraian pembahasan serta saran-saran atas hasil penelitian yang dilakukan.